



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -

Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
3. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pertanian adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 - 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ende.
23. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende.
24. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ende.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Dinas hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pertanian disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pertanian baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2026 adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pertanian yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap bidang.
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Pertanian;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Pertanian mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Pertanian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025- 2026 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. babIV Tujuan dan Sasaran
 - e. babV Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BABV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Pertanian melibatkan semua personil aparatur Dinas Pertanian dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pertanian selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas Pertanian didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pertanian menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Dinas Pertanian diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pertanian menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Pertanian kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Ende;

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pertanian melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Pertanian meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian Dinas Pertanian yang diketahui oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pertanian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Pertanian; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pertanian.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Pertanian dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 56

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Ende masa bhakti 2025-2026 dapat diselesaikan. Kerja keras dan kerja cerdas semua pihak yang secara bertahap menyelesaikan dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Ende selama dua tahun ke depan. Masukkan dari berbagai pihak telah memberikan kontribusi yang signifikan yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi pembangunan Pertanian.

Perencanaan sebagai salah satu yang telah ditetapkan, memiliki peran penting untuk keberhasilan organisasi tersebut. Perencanaan strategis sebagai salah satu bentuk perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi, termasuk lembaga publik pemerintahan sekalipun. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi dan evaluasi serta pengendalian.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Ende dimaksudkan untuk memberikan arah/pedoman dalam penyusunan penyelenggaraan pembangunan bidang Pertanian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2025-2026) yang terangkum dalam rumusan Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

Dengan telah selesainya penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi perencanaan pembangunan Pertanian di Ende.

Ende, 2024


Mathilda Gaudensia Ilmoe, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 196804071998032007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TAHUN 2025 – 2026

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ENDE 2025 – 2026

DAFTAR ISI

JUDUL

PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERTANIAN 2025 – 2026.....

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.....	38

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Prov.....	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan kajian lingkungan hidup Strategi.....	48
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	48

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 53

BAB VII RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN..... 57

BAB VII KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 65

BAB VIII PENUTUP..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Potensi Sumber Daya Alam.....	15
Tabel 2.2	Populasi Ternak.....	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/ Eselonering.....	17
Tabel 2.4	Jumlah jabatan Fungsional dan Tenaga Honorer.....	17
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian.....	17
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan.....	18
Tabel 2.7	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Disiplin Ilmu.....	18
Tabel 2.8	Aset Tanah, Bangunan dan Kendaraan pada Dinas Pertanian.....	19
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pertanian Kab. Ende Tahun 2019-2024.....	32
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.....	37
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
Tabel 3.2	Matrik SWOT.....	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	51
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Ende.....	58
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Ende Tahun 2025 – 2026.....	67
Tabel 7.2	Disajikan pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian kabupaten Ende.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alur Penyusunan Renstra PD	6
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Ende...	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Ende sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2019-2024, **sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2024.**

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa **untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Bupati sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.** Berdasarkan pernyataan tersebut jabatan Kepala Daerah Kabupaten Ende diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, menginstruksikan Bupati/Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Dalam hal ini, Dinas Pertanian Kabupaten Ende selaku Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan di sektor pertanian untuk menyusun Renstra sesuai tugas pokok

dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2 (dua) tahun.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka Dinas Pertanian Kabupaten Ende diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan bidang pertanian. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Ende tahun 2025-2026 akan dilaksanakan bertujuan untuk (1) pemenuhan kebutuhan pangan (2) meningkatkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan, (3) membuka lapangan kerja yang lebih luas, (4) berkembangnya usaha agribisnis dan agro industri sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi (5) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tersebut diperlukan strategi, arah kebijakan dan pola pendekatan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah serta bersinergi dengan program pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian suatu perencanaan pembangunan yang sinergis, tepat, terukur dan akuntabel melalui penyusunan Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten Ende merupakan suatu keharusan.

1.2.Landasan Hukum:

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025 -2026.

1.3.Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud:

1. Sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawasan dan evaluasi bagi Kepala Daerah guna mengukur Kinerja PD dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Ende.
2. Memberikan pedoman dan arah bagi seluruh jajaran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan pertanian di Kabupaten Ende.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang arah dan rencana pembangunan jangka menengah bidang pertanian di Kabupaten Ende.
4. Mewujudkan pembangunan pertanian yang terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh PD sebagai penjabaran tujuan Kepala Daerah terpilih selama 2 (dua) tahun;
2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 2 (dua) tahun ke depan;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD dimaksud.

1.4.Sistematika

Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 yang mencakup 8 (delapan) BAB dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, Gambaran pelayanan dinas, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, rencana program serta proritas, dan penetapan

indicator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende serta Kesimpulan. Masing- masing Bab sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE

Pada Bab Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Ende ini memuat uraian tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan Dinas Pertanian sampai dengan keadaan tahun 2023. Pada bab ini juga memuat tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dalam 2 (dua) tahun ke depan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah diuraikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ende; 2) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah; 3) Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Provinsi NTT; 4) Telaahan RTRW Kabupaten Ende dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta 5) Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Ende.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab IV ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan PD Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang ditampilkan dalam tabel.

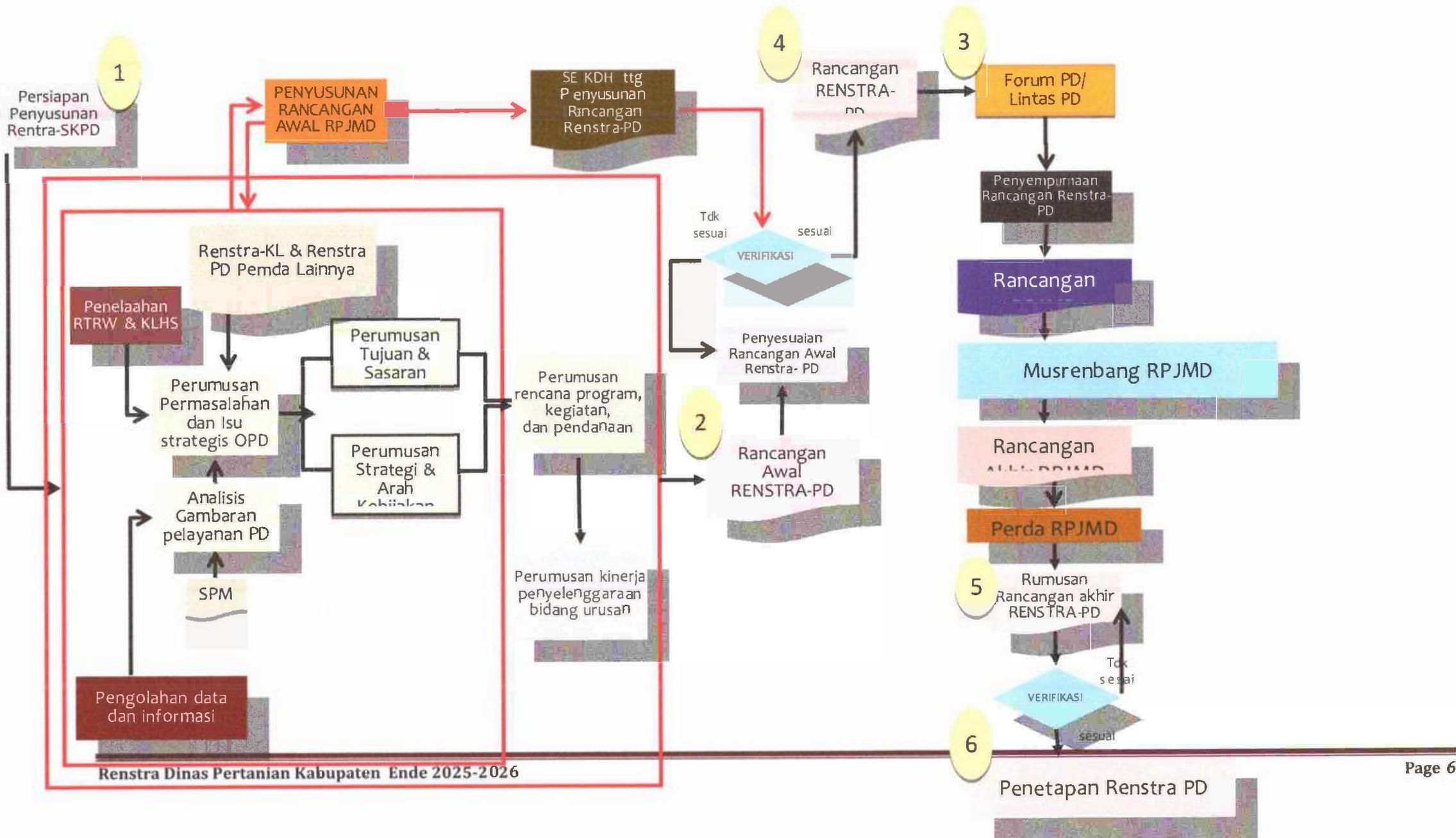
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini memuat tentang Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 dan di tampilkan dalam bentuk tabel.

BAB VIII PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang harapan dan dukungan dari semua *stakeholder* pelaku pembangunan pertanian serta ucapan terima kasih.

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD



Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Ende 2025-2026

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Ende

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende adalah melaksanakan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Bidang Pertanian, dengan uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas mempunyai Tugas :

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;
- 2) Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- 3) Pengembangan prasarana pertanian;
- 4) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian, penyediaan benih tanaman, benih/bibit temak dan hijauan pakan ternak;
- 5) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 6) Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 7) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- 8) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- 9) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 10) Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 11) Pemberian izin usaha /rekomendasi teknis pertanian;
- 12) Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 13) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat, mempunyai tugas :

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pemeliharaan kantor, kearsipan dan perpustakaan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan persuratan;
2. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
7. Pengelolaan kehumasan.

2.1.3. Bidang Tanaman Pangan :

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan;

3. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan;
6. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;
7. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan;
8. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang benih/ bibit, produksi, peternakan dan Kesehatan hewan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Pengelolaan sumber daya genetic hewan;
3. Pengendalian dan peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak dan benih/ bibit hijauan pakan ternak;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
6. Pengawasan obat hewan;
7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
8. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
9. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan ,Kesehatan hewan dan Kesehatan veteriner;
11. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
12. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
13. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Bidang Hortikultura :

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Hortikultura;
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Hortikultura;
3. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Hortikultura;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikulutura;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Hortikultura;
6. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di Bidang Hortikultura;
7. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Hortikultura; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian :

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pertanian;
2. Peneyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
3. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
4. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pstisida serta alat dan mesin pertanian;
5. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
6. Pemberian fasilitasi investasi pertanian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai demgam tugas dan fungsinya.

2.1.7 Bidang Perkebunan :

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyususunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
3. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
6. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
7. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di Bidang Perkebunan;
9. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan, dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8 Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian :

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas merencana operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian meliputi, kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan serta program dan evaluasi penyuluhan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penyelenggaraan kemampuan dan kapasitas penyuluh.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Memverifikasi langkah-langkah operasional bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memverifikasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. Mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
4. Memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
5. Mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan pendidikan dan pelatihan pertanian;

6. Mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Mengkoordinasi pelaksanaan administrasi bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
8. Memverifikasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

2.1.9 Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kab. Ende :

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional

Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing

Sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi, pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi

Sub koordinator terdiri atas:

1. Sub Koordinator Substansi Keuangan
2. Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Koordinator Substansi Serealia
4. Sub Koordinator Substansi Aneka Kacang dan Umbi
5. Sub Koordinator Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
6. Sub Koordinator Substansi Perbibitan, Pakan dan Produksi Ternak
7. Sub Koordinator Substansi Kesehatan Hewan
8. Sub Koordinator Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perternakan
9. Sub Koordinator Substansi Buah dan Florikultural
10. Sub Koordinator Substansi Sayuran dan Tanaman Obat

11. Sub Koordinator Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura
12. Sub Koordinator Substansi Perluasan Areal, Irigasi dan Perlindungan Lahan
13. Sub Koordinator Substansi Alat dan Mesin Pertanian
14. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Tanaman, Pupuk dan Pestisida
15. Sub Koordinator Substansi Tanaman Semusim dan Rempah
16. Sub Koordinator Substansi Tanaman Tahunan dan Penyegar
17. Sub Koordinator Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
18. Sub Koordinator Substansi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
19. Sub Koordinator Substansi Penyelenggaraan Penyuluhan dan
20. Sub Koordinator Substansi Program nan Evaluasi Penyuluhan

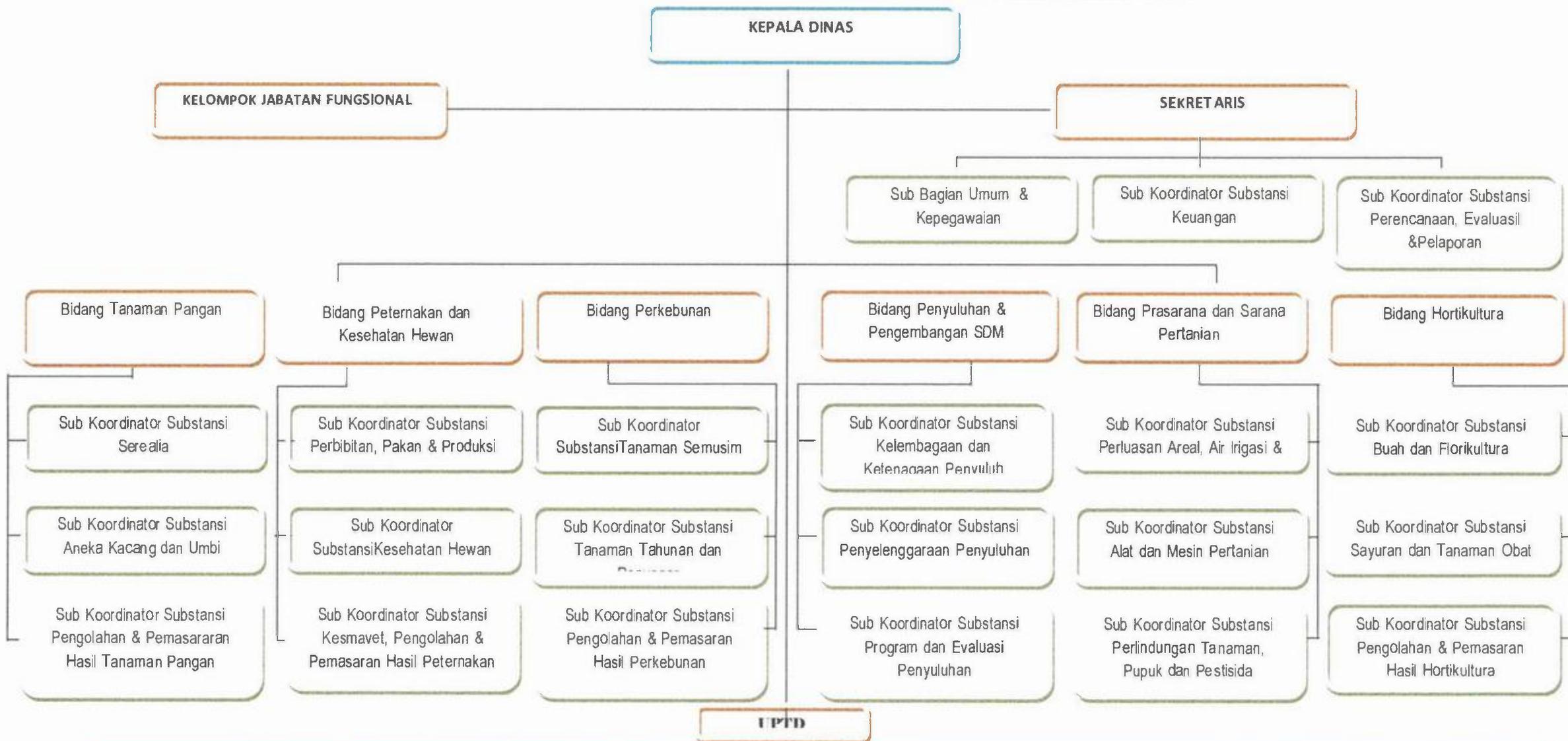
2.1.10 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan dengan kegiatan operasional dilapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu dengan instansi teknis lainnyavmaupun peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas operasional dan petugas fungsional.

Mengenai tenaga fungsional sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE



2.2. Sumber Daya PD

2.2.1. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian dapat dilihat pada tabel pemanfaatan lahan berikut ini :

Tabel 2.1. Potensi Sumber Daya Alam

No	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Jumlah (ha)
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		1 kali	2 kali	≥ 3 kali	Ditanami Tanaman Lain	Tidak Ditanami Apapun	
I	LAHAN						
1.1	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	682,56	2.567,26	-	-	-	3.249,82
	b. Tadah Hujan	1.015,37		-	-	-	1.015,37
	c. Rawa	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan	1.697,93	2.567,26	-	-	-	4.265,19
	Penggunaan Lahan						Luas (ha)
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegal/Kebun						32.888,81
	b. Ladang/Huma						26.637
	c. Perkebunan						44.630
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat						11.396
	e. Padang Pengembalaan/padang rumput						8.242
	f. Hutan Negara						1.430
	g. Sementara tidak diusahakan *)						51.752
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)						8.784
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah						181.683
II	LAHANBUKANPERTANIAN						14.635
	TOTALLUAS						204.660
	Keterangan :						
	*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun, lahan sawah yang tidak ditanami apapun > lebih dari 2 tahun digolongkan lahan pertanian bukan sawah						
	***) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun						

2.2.2 Populasi Ternak Tahun 2023

Tabel 2.2 : Populasi Ternak Tahun 2023

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)
1	Sapi	38.985
2	Kerbau	2.577
3	Kuda	1.614
4	Kambing	26.961
5	Domba	19
6	Babi	73.665
7	Ayam Buras	299.991
8	Ayam Ras Petelur	44.300
9	Ayam Ras Pedaging	108.152
10	Itik	1.643
11	Bebek	12.544

2.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Penunjang

- a. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berdasarkan Data Statistik "Ende dalam Angka Tahun 2023" adalah sebanyak 68.333 orang, dimana Pekerja laki-laki sebanyak 36.294 orang dan perempuan sebanyak 32.039 orang.
- b. Aparatur Pendukung :
 - Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL): 152 orang (PNS 100 orang dan PPPK 52 orang)
 - Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) : 7 Orang (PNS 5 orang dan Kontrak Propinsi 2 orang).
 - Petugas Kesehatan Hewan/Resort Peternakan : 18 orang (PNS 14 orang dan Kontrak Pusat 1 orang, Kontrak Propinsi 3 orang).

2.2. 4. Kelembagaan Penunjang

- a. Balai Penyuluhan Pertanian : 21 Unit
- b. Puskesmas : 20 Unit
- b. Jumlah Gapoktan : 257 Gapoktan
- c. Kelompok Tani 2033 kelompok, terdiri dari :
 - Kelas Pemula : 1.372 Kelompok
 - Kelas Lanjut : 638 Kelompok
 - Kelas Madya : 23 Kelompok

2.2.5. Ketenagaan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ende perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia aparatur. Rincian ketersediaan aparatur yang berada di Lingkup OPD adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/ Eselonering

Tabel 2.3: Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/ Eselonering

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Keterangan		
				Definitif	PLT	Lowong
1.	Kepala Dinas	II –b	1	-	-	1
2.	Sekretaris	III –a	1	1	-	-
3.	Kepala Bidang	III – b	6	5	-	-
4.	Kepala Sub Bagian	IV-a	1	1	-	-
6.	Kepala UPT	IV-a	1	1	-	-
7.	KTU UPT	IV-b	1	1		
	Jumlah		11	10	-	1

b. Jumlah jabatan Fungsional dan Tenaga Honorer:

Tabel 2.4: Jumlah jabatan Fungsional dan Tenaga Honorer:

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Fungsional tertentu	190	
2.	Fungsional umum	33	
3.	Struktural	10	
4.	Kontrak Pusat	2	1 orang Tenaga Kesehatan Hewan 1 orang Tenaga Perkebunan
5.	Kontrak Propinsi	3	Tenaga Kesehatan Hewan
6.	Kontrak Daerah	-	
7.	Tenaga Harian Lepas	-	
8.	Kontrak	2	
	Jumlah	240	

c. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	
	- PNS Daerah Otonom Tk.II	167
	- PNS Daerah Otonom Tk.I	2

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah (orang)
2	PPPK	66
2.	Tenaga Kontrak Daerah	-
3.	Tenaga Kontrak Propinsi	3
4.	Kontrak Pusat	2
5.	Kontrak Dinas	2
	Jumlah	242

d. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan:

Tabel 2.6 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan :

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda(IV/c)	-
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	7
3.	Pembina (IV/a)	15
4.	Penata Tk. I/ III-d	37
5.	Penata/ III-c	13
6.	Penata Muda Tk. I/ III-b	44
7.	Penata Muda / III –a	16
8.	Pengatur Tk. I/ II –d	51
9.	Pengatur/II –c	22
10.	Pengatur Muda Tk. I/ II –b	10
11.	Pengatur Muda/II –a	16
12.	Juru Tk. I/ I-d	2
	Jumlah	233

d. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Disiplin Ilmu :

Tabel 2.7: Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Disiplin Ilmu:

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	
	- S2 Peternakan	4
2	Sarjana (S I/ DIV) :	-
	- S1 Pertanian	66
	- S I Kehutanan	1
	- S I Teknologi Pertanian	7
	- S I Peternakan	17
	- S I Kedokteran Hewan	7
	- S1 Sosiatri	1
	- SI Ekonomi	1

	- D IV Penyuluhan Pertanian/	36
3.	Diploma III :	
	- D3 Pertanian / Peternakan	32
4.	SLTA:	
	- SMA/SPP/SPMA	59
5.	SD	2
	Jumlah	233

2.2.6. Sarana, Prasarana dan Aset

Tabel 2.8. Aset Tanah, Bangunan dan Kendaraan pada Dinas Pertanian

No	Uraian	Jumlah	
1	Tanah	14	bidang
2	Bangunan Kantor	5	unit
3	Tanah dan Bangunan Kantor BPP	18	Unit
4	Laboratorium	1	Unit
5	Balai Perbenihan/Perbibitan	2	Unit
6	RPH	1	Unit
7	Kios Penjualan Daging	2	Unit
8	Rumah Jaga	3	Unit
9	Gudang	2	Unit
10	Screen House	3	Unit
11	Lantai Jemur	2	Unit
13	Pagar Kantor	450	m ²
14	Pagar RPH	260	m ²
15	Bangunan Pos Keswan	13	Unit
16	Tempat Parkir	1	Unit
17	Mobil	5	Unit
18	Motor	107	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya

- Padi Sawah

Capaian indikator produktivitas padi sawah adalah sebesar 6.48 ton/ha dari target 7,02 ton per/ha. Tidak tercapainya produktivitas ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu :

- adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang sehingga debit air menurun.
- Minimnya bantuan benih padi unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani sawah serta petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri.

- Berkurangnya luas tanam, tahun 2022 luas tanam seluas 7.871 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 6.100,22 hektar ada selisi 1.770,78 hektar yang tidak dilakukan penanaman.

a. Padi Ladang

Capaian indikator kinerja produktivitas padi ladang adalah 3,01 ton/ha dari target 3,02 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas padi ladang pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,01 ton/ha maka tidak terjadi peningkatan produktivitas. Tidak terjadi peningkatan target tapi produktivitas disebabkan beberapa faktor yaitu :

- adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit.
- Tidak adanya bantuan benih padi unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani, dari total luas tanam seluas 2.235,70 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri atau benih lokal.
- Akibat dari anomali iklim (elnino) sehingga Berkurangnya luas tanam, tahun 2022 luas tanam seluas 2.810 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 2.235,70 hektar.

b. Jagung

- Capaian indikator produktivitas jagung adalah sebesar 3,89 ton/ha dari target 4,03 ton/ha atau, jika dibandingkan dengan produktivitas jagung pada tahun 2022 yang sebesar 4,01 ton/ha, maka terjadi penurunan produktivitas sebesar 0,12 ton/ha. Adanya Penurunan produktifitas dibandingkan dengan tahun lalu dikarena :
- adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit pada musim tanam Oktober –Maret.
- Minimnya bantuan benih jagung unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani. petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri.
- Berkurangnya luas tanam, tahun 2022 luas tanam seluas 4.825 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 2.881,8 hektar. ada selisi 1.943,2 hektar.

c. Ubi Kayu

Capaian indikator produktivitas ubi kayu sebesar 25.47 ton/ha dari target 26.00 ton/ha atau tidak mencapai target dengan selisi sebesar 0.53 ton/ha. Adanya penurunan target kinerja produktivitas tersebut disebabkan oleh:

- adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit pada musim tanam Oktober –Maret.
- Minimnya bantuan bibit ubi yang unggul, bibit ubi kayu selama ini yang diusahakan oleh petani adalah bibit lokal yang dihasilkan secara turun temurun karena tidak ada intervensi anggaran untuk pemulihan bibit tanaman ubi kayu di kabupaten Ende.
- Dominan ubi kayu yaitu ubi kayu nuabosi yang didominasi ubi terigu sebagai ubi unggul sedangkan ada juga ubi kayu tana ai dan thoko Reko yang tersebar dikawasan Nuabosi. Untuk luas tanam ubi kayu di Kecamatan Ende seluas 128 hektar.

d. Ubi jalar

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 8,91 ton/ha dari target 10,40 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas ubi jalar pada tahun 2022 sebesar 10,00 ton/ha, maka produktivitas mengalami penurunan di tahun 2023. Tidak tercapai target ini disebabkan hampir sama dengan komoditi ubi kayu. Luas tanama terbesar ada di Kecamatan Kelimutu yaitu seluas 27 hektar.

e. Kacang kedelai

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1.50 ton/ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang kedelai pada tahun 2022 sebesar 1,50 ton/ha. Minimnya produksi pada tahun 2023 disebabkan karena selama tahun 2023 jumlah tanam hanya 2 hektar yaitu di wewaria, hal ini disebabkan karena tidak adanya bantuan benih baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II serta minat petani untuk menanam kedelai masih rendah.

f. Kacang Tanah

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1,39 ton/ ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang tanah pada tahun 2022 sebesar 1,39 ton/ha, maka tidak ada kenaikan atau penurunan produktivitas. Belum Tercapainya target produktivitas kacang tanah sangat dipengaruhi oleh penggunaan dan dukungan sarana produksi. Selama ini untuk komoditi kacang tanah tidak ada intervensi dari Pemerintah, Petani melakukan budidaya kacang tanah secara mandiri dengan di damping oleh PPL.

g. Kacang Hijau

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1,54 ton/ ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang hijau pada tahun 2022 sebesar 1,70 ton/ha, maka terjadi penurunan produktivitas sebesar 0,16 Ton/Ha. Tidak Tercapainya target

produksi kacang hijau sangat dipengaruhi oleh kualitas benih dan ketersediaan air, selama ini pertanaman kacang hijau dilakukan secara mandiri oleh petani tanpa adanya intervensi dari Pemerintah.

h. Sorghum

Capaian indikator kinerja sorghum adalah sebesar 0,54 ton/ ha dari target 2.10 ton/ha, Jika dibandingkan dengan produktivitas sorghum pada tahun 2022 sebesar 1.98 ton/ha maka ada Penurunan produktivitas sebesar 1,44 ton/ha. Tidak Tercapainya target produksi sorghum sangat dipengaruhi pada saat proses budidaya sorgum terutama pemilihan varietas dan proses panen dimana mininmya alat prosesing yang ada ditingkat petani sehingga kehilangan bulir sorgum cukup tinggi pada saat panen, hal ini dilihat dari menurunnya produtifitas sorgum, serta factor iklim yang tidak menentu dan penggunaan bibit lokal. 2 kecamatan terbesar yang masih membudidaya sorgum yaitu Kecamatan Lepembusu Kelisoke dan kotabaru seluas 35 Hektar.

a. Meningkatnya produksi tanaman hortikultura

➤ Cabe Rawit

Capaian indikator komoditi cabe rawit yaitu produktivitas sebesar 1,40 ton/ha dari target peningkatan produktivitas per tahun sebesar 1,39 ton/ha atau meningkat 0.01% . tercapainya peningkatan Capaian indikator ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti:

- ✓ Adanya bantuan Pemerintah untuk Pengembangan Kawasan Cabe dalam rangka mengatasi inflasi seluas 20 Ha (APBD II) , di 5 Kecamatan yakni Kotabaru, Nangapanda, Ndonga, Ndonga Timur, Wolowaru , Pengembangan Cabe (APBN) seluas 5 ha di Kecamatan Kelimutu dan Wewaria.
- ✓ Adanya pendampingan yang intensif pada kelompok –kelompok petani hortikultura.
- ✓ Tidak adanya serangan organisme pengganggu tanaman secara sporadis pada tanaman cabai rawit.

➤ Cabe Besar

Capaian indikator komoditi Cabe Besar tahun 2023 yaitu produktivitas sebesar 1,73 ton/ha dari target produktivitas tahun 2023 sebesar 1,59 ton/ha, meningkat 0.14% dari target yang ditetapkan. tercapainya peningkatan target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti:

- ✓ Adanya pendampingan oleh PPL yang intensif pada kelompok – kelompok tani hortikultura.

- ✓ Tidak adanya serangan organisme pengganggu tanaman secara sporadis pada tanaman cabai besar.

Namun akibat dari adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan sehingga jumlah luas tanam menurun dari tahun 2022. Di tahun 2022 luas tanam seluas 36 hektar sedangkan di tahun 2023 luas tanam menurun menjadi 26,04 hektar dengan produksi cabe besar 451 kwintal.

➤ Bawang Merah

Capaian indikator Komoditi Bawang Merah yaitu produktivitas sebesar 2,66 ton/ha dari target tahun 2023 sebesar 2,45 ton/ha atau meningkat 0,21 ton/ha dari target yang ditetapkan. tercapainya peningkatan target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti:

- ✓ Adanya pemanfaatan lahan khususnya di lahan sawah tadah hujan pada periode Oktober – maret (Okmar) dimana setelah panen pada bulan maret – mei petani menanam bawang merah.
- ✓ Adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan untuk budidaya Bawang Merah ditingkat kelompok tani / petani.

➤ Bawang Putih

Capaian indikator Komoditi Bawang Putih yaitu produktivitas sebesar 2,60 ton/ha dari target peningkatan produksi per tahun sebesar 2,29 ton/ha atau meningkat 0,31 ton/ha dari target yang ditetapkan. Tercapainya peningkatan target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti Adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan untuk budidaya Bawang putih ditingkat kelompok tani / petani, Namun akibat dari adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan sehingga jumlah luas tanam menurun dari tahun 2022. Di tahun 2022 luas tanam seluas 37 hektar sedangkan di tahun 2023 luas tanam menurun menjadi 8 hektar. Menurun seluas 29 hektar dengan produksinya 208 kwintal. Kecamatan yang melakukan budidaya bawang putih yaitu kecamatan Wolojita dan Lio timur.

➤ Wortel

Capaian indikator komoditi Wortel yaitu produktivitas sebesar 0,92 ton/ha dari target tahun 2023 sebesar 0,83 ton/ha atau meningkat 0,09 ton/ha. tercapainya target Produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan untuk budidaya wortel ditingkat kelompok tani / petani. Luas lahan terbesar untuk budidaya wortel di Kecamatan Kelimutu yaitu 17 hektar dengan produksi 158,78 kwintal. Secara kabupaten produksi tahun 2023 yaitu 311 kwintal.

➤ Kentang

Capaian indikator komoditi Kentang produktivitas sebesar 9,74 ton/ha dari target tahun 2023 sebesar 8,92 ton/ha atau meningkat 0,82 ton/ha. tercapainya peningkatan Capaian indikator ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti Adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan untuk budidaya Kentang ditingkat kelompok tani / petani, serta Adanya bantuan Pupuk organik cair di sentra produksi kentang yaitu Desa Nuamuri Kecamatan Kelimutu dan Desa Wiwipemo Kee. Wolojita.

Namun akibat dari adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan sehingga jumlah luas tanam menurun dari tahun 2022. Di tahun 2022 luas tanam seluas 31,60 hektar sedangkan di tahun 2023 luas tanam menurun menjadi 23,40 hektar. Menurun seluas 8,2 hektar dengan produksinya 2.280 kwintal. Kecamatan yang melakukan budidaya bawang putih yaitu kecamatan Kelimutu, Wolojita dan Lepembusu Kelisoke.

➤ Kubis/Kol

Capaian indikator komoditi Kubis/Kol tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 1,65 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,49 ton/ha atau meningkat 0,16 ton/ha. tercapainya peningkatan target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti Tingkat kemampuan sumber daya manusia petani dalam mengelolah usahanya serta adanya pasar yang pasti.

Namun akibat dari adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan sehingga jumlah luas tanam menurun dari tahun 2022. Di tahun 2022 luas tanam seluas 81 hektar sedangkan di tahun 2023 luas tanam menurun menjadi 52 hektar. Menurun seluas 29 hektar dengan produksinya 817 kwintal.

➤ Petsai/Sawi

Capaian indikator komoditi Petsai/Sawi tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 1,83 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,70 ton/ha atau meningkat 0,13 ton/ha dari target yang ditetapkan. meningkatnya Capaian indikator komoditi Petsai/Sawi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti Tingkat kemampuan sumber daya manusia petani dalam mengelolah serta Adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan. usahanya untuk budidaya Petsai/Sawi tersebar di 14 Kecamatan dengan jumlah produksi tahun 2023 sebesar 1.848 kwintal.

➤ Tomat

Capaian indikator komoditi Tomat tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 2,58 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 2,55 ton/ha, atau meningkat 0,03 ton/ha dari target yang ditetapkan. Tercapainya target produksi ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti Tingkat kemampuan sumber daya manusia petani dalam mengelolah serta Adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan. usahanya untuk budidaya tomat terbesar Kecamatan Lepembusu Kelisoke dengan luas 20 hektar dengan luas total kabupaten 86,40 hektar dengan jumlah produksi tahun 2023 sebesar 2.228 kwintal.

➤ Pisang

Capaian indikator komoditi Pisang tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 8,56 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,55 ton/ha, atau meningkat 0,01 ton/ha dari target yang ditetapkan. Pengembangan tanaman pisang tersebar di semua kecamatan dengan luas lahan terbesar ada di kecamatan Nangapanda yaitu seluas 61 hektar dengan produksi total kabupaten sebanyak 5.367 ton, untuk pengembangan budidaya pisang dilakukan secara mandiri oleh petani.

➤ Mangga

Capaian indikator komoditi Mangga tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 6,99 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 6,99 ton/ha. Pengembangan tanaman mangga tersebar di semua kecamatan dengan luas lahan terbesar ada di kecamatan Nangapanda yaitu seluas 28 hektar dengan produksi total kabupaten sebanyak 1.447 ton, untuk pengembangan budidaya mangga dilakukan secara mandiri oleh petani.

➤ Pepaya

Capaian indikator komoditi pepaya tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 9,83 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,75 ton/ha. atau menurun 1,08 ton/ha. Pengembangan tanaman pepaya tersebar di semua kecamatan dengan luas lahan terbesar ada di kecamatan Ende yaitu seluas 9 hektar dengan produksi total kabupaten sebanyak 747 ton, untuk pengembangan budidaya pepaya dilakukan secara mandiri oleh petani.

➤ Jahe

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini jahe tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 13,51 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 12,75 ton/ha atau menurun 0,76 ton/ha dari target yang ditetapkan. Luas tanam 185,55 hektar dengan Produksi jahe pada tahun 2023 sebanyak 2.507 ton dengan sentra produksi di kecamatan Kelimutu dan Ndonga Timur. tercapainya target produksi ini dapat

disebabkan beberapa faktor seperti adanya bantuan kegiatan Pengembangan Kawasan Jahe seluas 5 ha di Kecamatan Wolojita Desa Wiwipemo.

➤ **Kunyit**

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kunyit tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 7,70 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 7,70 ton/ha. Produksi kunyit pada tahun 2023 sebanyak 411,83 ton meningkat 7,53 ton dari produksi tahun 2022. dengan sentra produksi di kecamatan Kelimutu dan Lepembusu Kelisoke, Budidaya masih mengandalkan swadaya petani.

➤ **Kencur**

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kencur tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 8,15 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,15 . Produksi kencur pada tahun 2023 sebanyak 375,04 ton dengan sentra produksi di kecamatan Kelimutu, Wolojita dan Ndonga Timur. Budidaya masih mengandalkan swadaya petani.

b. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan (7 komoditi unggulan daerah)

➤ **Kelapa**

Capaian indikator produksi komoditi Kelapa tahun 2023 sebesar 1,04 % dari target tahun 2023 sebesar 1.20% atau kurang 0,16% dari target yang ditetapkan. Namun ada peningkatan Produksi Kelapa pada tahun 2022 sebesar 9.313,64 ton dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 9.217,74 ton atau meningkat 95,9 ton, tidak tercapainya Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- Kondisi pertanaman kelapa saat dalam usia tua dan perlu adanya peremajaan kelapa di tingkat petani, atau menggantikan tanaman kelapa yang tua dengan tanaman kelapa yang baru. untuk di ketahui pada tahun 2023 adanya Kegiatan peremajaan tanaman kelapa 100 ha di kecamatan Pulau Ende, Nangapanda, dan Ende.

Luas lahan kelapa saat ini 12.404,63 hektar yang tersebar di 20 kecamatan dengan luas lahan terbesar di Kecamatan nangapanda yaitu 2.435,60 hektar.

➤ **Kakao**

Capaian indikator produksi komoditi kakao tahun 2023 sebesar 0,83% dari target tahun 2023 sebesar 1,78% atau kurang 0,95% dari target yang ditetapkan. Namun ada peningkatan Produksi kakao pada tahun 2023 sebesar 4.579,28 ton dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.544,19 ton atau meningkat 35,09 ton, tidak tercapainya Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- kurangnya intervensi sarana produksi pada komoditi kakao di tingkat petani dan disebabkan juga minimnya penerapan inovasi oleh petani yang telah disampaikan oleh PPL tentang cara peningkatan produksi kakao antara lain melalui pemangkasan, pemupukan, peremajaan, sambung pucuk dan lain-lain.

Luas lahan kakao saat ini 9.767,19 hektar yang tersebar di 21 kecamatan dengan luas lahan terbesar di Kecamatan nangapanda yaitu 1.639,04 hektar.

➤ Jambu Mete

Capaian indikator produksi komoditi Jambu Mete tahun 2023 sebesar 0,26 % dari target tahun 2023 sebesar 0,80%, atau kurang 0,54% dari target yang ditetapkan. Namun ada peningkatan Produksi jambu mete pada tahun 2023 sebesar 3.953,34 ton dibandingkan tahun 2022 sebesar 3.945,82 ton atau meningkat 7,52 ton, tidak tercapainya Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- kurangnya peremajaan jambu mete di tingkat petani, atau menggantikan tanaman jambu mete yang tua dengan tanaman jambu mete yang baru dan disebabkan juga minimnya penerapan inovasi oleh petani yang telah disampaikan oleh PPL tentang cara peningkatan produksi jambu mete antara lain melalui pemangkasan, pemupukan, peremajaan, sanitasi dan lain-lain.
- Untuk tahun ini adanya intervensi pemerintah yang bersumber dari dana APBN yaitu Kegiatan perluasan jambu mete 150 ha dikecamatan kota baru dan Kegiatan peremajaan jambu mete 150 ha di kecamatan wewaria dan maukaro.

Total luas lahan jambu mete di Kabupaten Ende seluas 9.661,34 hektar yang tersebar di 20 kecamatan dan yang terluas di kecamatan Wewaria yaitu seluas 1.718,01 hektar.

➤ Kopi

Capaian indikator produksi komoditi Kopi tahun 2023 sebesar -0,98% dari target tahun 2023 sebesar 0,90% atau kurang 1,88% dari target yang ditetapkan.

Produksi kopi pada tahun 2023 sebesar 3.406,63 ton dan tahun 2021 sebesar 3.441,70 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 35,07 ton. Belum tercapainya target Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- kurangnya peremajaan Kopi di tingkat petani, atau menggantikan tanaman Kopi yang tua dengan tanaman Kopi yang baru dan disebabkan juga minimnya penerapan inovasi oleh petani yang telah disampaikan oleh PPL tentang cara peningkatan produksi Kopi antara lain melalui pemangkasan, pemupukan, peremajaan, sanitasi dan lain-lain.
- Adanya anomali iklim elnino dimana kemarau yang berkepanjangan yang factor utama turunnya produksi kopi tahun 2023. Kisaran suhu udara optimal untuk pertumbuhan tanaman kopi adalah 18°C-21°C, sedangkan suhu tanah optimal untuk

pertumbuhan tanaman kopi 21°C, sedangkan suhu pada tahun 2023 di Kabupaten Ende mencapai 34-36°C.

Luas lahan kopi di Kabupaten Ende seluas 8.860,68 Hektar terdiri kopi Arabika seluas 4.321,15 hektar yang tersebar di 12 kecamatan dengan luas lahan terluas di kecamatan Ende yaitu 761,03 hektar dan kopi Robusta seluas 4.539,53 hektar yang tersebar di 17 kecamatan dengan luas lahan terluas di kecamatan wolowaru yaitu 793,03 hektar.

➤ Kemiri

Capaian indikator produksi komoditi Kemiri tahun 2023 sebesar 0,04% dari target tahun 2023 sebesar 1,85% atau kurang 1,81% dari target yang ditetapkan.

Produksi Kemiri pada tahun 2023 sebesar 5.370,40 ton dan tahun 2022 sebesar 5.370,04 ton. Belum tercapainya target Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- kurangnya peremajaan Kemiri di tingkat petani, atau menggantikan tanaman Kemiri yang tua dengan tanaman Kemiri yang barudan disebabkan juga minimnya penerapan inovasi oleh petani yang telah disampaikan oleh PPL.
- Tidak adanya intervensi sarana produksi (bibit, pupuk,dll) dari Pemerintah. Komoditi ini diwariskan secara turun temurun oleh petani tanpa adanya perlakuan khusus.

Luas lahan kemiri di Kabupaten Ende seluas 8.803,12 Hektar yang tersebar di 19 Kecamatan dan kecamatan dengan luas lahan tertinggi yaitu kecamatan Detukeli dengan luas lahan 1.401,03 hektar.

➤ Cengkeh

Capaian indikator produksi komoditi Cengkeh tahun 2023 sebesar 0,39% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,30% atau kurang 0,91% dari target yang ditetapkan.

Produksi Cengkeh pada tahun 2023 sebesar 448,59 ton dan tahun 2022 sebesar 449,85 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 1,26 ton. Belum tercapainya target Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- kurangnya peremajaan tanaman Cengkeh di tingkat petani, atau menggantikan tanaman Cengkeh yang tua dengan tanaman Cengkeh yang baru serta kurangnya pemberian nutrisi tambahan untuk tanaman dan juga disebabkan minimnya penerapan inovasi oleh petani yang telah disampaikan oleh PPL.
- Adanya anomali iklim elnino dimana kemarau yang berkepanjangan yang factor utama turunnya produksi kopi tahun 2023. Curah hujan optimal bagi pertumbuhan tanaman cengkeh antara 1500-4500 mm/tahun. Cengkeh menghendaki sinar matahari minimal 8 jam per hari. Suhu yang optimal tanaman ini dikehendaki adalah 22-30°C, dengan kelembaban udara antara 60-80%., sedangkan suhu pada tahun 2023 di Kabupaten Ende mencapai 34-36°C.

Luas lahan cengkeh di Kabupaten Ende seluas 1.712,65 Hektar yang tersebar di 18 Kecamatan dan kecamatan dengan luas lahan tertinggi yaitu kecamatan kelimutu dengan luas lahan 225 hektar.

➤ Pala

Capaian indikator produksi komoditi Cengkeh tahun 2023 sebesar -0,02% dari target tahun 2022 sebesar 0,60%. atau menurun sebesar 0,62% dari target yang ditetapkan.

Produksi pala pada tahun 2023 sebesar 259,30 ton dan tahun 2021 sebesar 262,55 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 3,25 ton. Tidak tercapainya target Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor seperti :

- Adanya anomali iklim elnino dimana kemarau yang berkepanjangan yang factor utama turunnya produksi kopi tahun 2023. tanaman pala secara umum dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian sekitar 0-700 mdpl dengan kebutuhan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 2000–3500 mm/tahunnya dan kelembapan udara sekitar 50-80 %. Tanaman ini dapat tumbuh biasanya hingga ketinggian pohon 5-15 meter atau bahkan dapat mencapai 30 meter. Pala cocok tumbuh pada suhu udara sekitar 20-30°C dengan struktur tanah tempat tumbuhnya memiliki rentang yang cukup besar yaitu dari tanah padat hingga berpasir serta memiliki derajat keasaman 5,5 – 7. sedangkan suhu pada tahun 2023 di Kabupaten Ende mencapai 34-36°C dan curah hujan kurang.

c. Meningkatnya Produksi Hasil Ternak

Indikator kinerja ini didukung oleh indikator kinerja Produksi daging dan Indikator Kinerja Produksi telur. Data produksi daging merupakan hasil kompilasi data diambil dari data pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun data pemotongan di luar RPH yang tercatat serta laporan petugas lapangan dan asumsi pemotongan di luar RPH yang tidak tercatat. Dengan demikian data konsumsi atau data pemotongan sangat mempengaruhi perhitungan data produksi daging.

Capaian Kinerja ini realisasi rata-rata 1,93% dari target 2,04%, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Sapi

Capaian indikator produksi daging sapi tahun 2023 sebesar 2,01% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 2,50%. atau menurun sebesar 0,49 % dari target yang ditetapkan, tidak tercapainya indikator ini disebabkan salah satu factor yaitu penurunan konsumsi daging sapi di tingkat masyarakat serta adanya substitusi konsumen ke konsumsi daging babi.

Produksi daging sapi tahun 2023 sebanyak 438.112 Kg, dengan populasi ternak sapi di kabupaten Ende sebanyak 38.985 ekor yang tersebar di 20 kecamatan, dengan populasi tertinggi ada di Kecamatan Wewaria dengan populasi ternak sapi sebanyak 3.706 ekor.

Untuk data Produksi daging sapi dari sumber utama yaitu Rumah potong hewan Nangesa Kecamatan Ndonga dengan jumlah pemotongan sapi pada tahun 2023 sebanyak 1.336 ekor dengan produksi daging sebanyak 140.532 Kg.

➤ Kerbau

Capaian indikator produksi daging kerbau tahun 2023 sebesar 1,12% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,00% atau meningkat 0,12% dari target dengan Produksi daging kerbau tahun 2023 sebanyak 39.984 Kg.

peningkatan ini disebabkan karena tingkat ekspor pada tahun 2023 cukup tinggi yaitu pengeluran ternak sebanyak 150 ekor dengan tujuan Kabupaten Jeneponto-Sulawesi Selatan dan juga ke Surabaya –Jawa Timur menggunakan kapal roto yang semakin lancar, serta adanya peningkatan jumlah pemotongan kerbau di Rumah Potong Hewan.

➤ Babi

Capaian indikator kinerja produksi daging ternak babi sebesar 2,09 % lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 2,00%, ada peningkatan dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan tingkat konsumsi daging cukup tinggi di tingkat konsumen. Untuk diketahui pada tahun 2023 tingkat konsumsi daging mencapai 693.486 kg.

populasi ternak babi di kabupaten Ende sebanyak 73.665 ekor yang tersebar di 21 kecamatan, dengan populasi tertinggi ada di Kecamatan Detusoko dengan populasi ternak babi sebanyak 5.112 ekor.

➤ Kambing

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak kambing sebesar 0,40 % dari target sebesar 1%. Menurun sebesar 0,60% dengan produksi daging sebanyak 44.961 Kg menurun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebanyak 45.322 kg atau menurun 361 Kg. jumlah pemotongan tercatat oleh petugas sebanyak 512 ekor, konsumsi daging kambing terbanyak dari rumah makan yang tersebar di Kab.Ende.

populasi ternak babi di kabupaten Ende sebanyak 26.961 ekor yang tersebar di 21 kecamatan, dengan populasi tertinggi ada di Kecamatan Nangapanda dengan populasi ternak kambing sebanyak 2.821 ekor.

➤ Ayam

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak ayam sebesar 3,16 % lebih rendah dari target yaitu 3%, atau meningkat 0,16% dengan produksi daging sebanyak 220.602 Kg, adanya peningkatan ini dikarenakan tingginya tingkat konsumsi daging ayam ditingkat konsumen/masyarakat.

➤ Telur

Capaian indikator kinerja untuk produksi telur adalah 2,79 % , capaian ini melebihi mencapai target RPJMD Tahun 2023 sebesar 2,75% dengan produksi telur pada tahun 2023 sebanyak 277.664 Kg Peningkatan capaian indikator ini disebabkan beberapa hal antara lain tinggi konsumsi telur serta Adanya peningkatan populasi ternak ayam petelur di tingkat pengusaha ternak ayam di Kab. Ende.

Berikut dapat dilihat tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar																
	Padi Sawah	7,02	6,91	7,01	7,01	7,02	7,02	7,10	7,04	7,01	6,48		101,28	100,43	99,86	92,31	
	Padi Ladang	3,02	2,84	3,01	3,01	3,02	3,02	3,00	3,01	3,01	3,01		99,67	100,00	99,67	99,67	
	Jagung	4,03	3,52	4,03	4,02	4,03	4,03	4,02	3,99	4,01	3,89		99,75	99,25	99,50	96,53	
	Ubi Kayu	27,00	14	25	25,00	26,00	27,00	14,6	34,95	25,04	25,47		58,40	139,80	96,31	94,33	
	Ubi Jalar	10,50	8,06	10,02	10,3	10,40	10,50	10,00	10,00	10,00	8,91		99,80	97,09	96,15	84,86	
	Kacang Kedelai	1,70	1,32	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,50	1,50		100,00	100,00	88,24	88,24	
	Kacang Tanah	1,70	1,67	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,55	1,39	1,39		100,00	91,18	81,76	81,76	
	Kacang Hijau	1,70	1,71	1,70	1,70	1,70	1,70	1,75	0,55	1,70	1,54		102,94	32,35	100,00	90,59	
	Sorghum	2,40	1,79	1,7	2,10	2,20	2,40	2,09	2,39	1,98	0,54		122,94	113,81	90,00	22,50	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Cakupan Nilai Produktifitas Hortikultura																
	Cabe Rawit	1.39	1.26	1.29	1.39	1.39	1.39	1.39	1.60	1.42	1.40		110.32	124.0	102.16	100.72	
	Cabe Besar	1.60	1.39	1.42	1.58	1.59	1.60	1.50	1.60	1.64	1.73		107.91	112.7	103.80	108.81	
	Bawang Merah	2.46	2.16	2.19	2.44	2.45	2.46	2.42	2.51	2.48	2.66		112.04	114.6	101.64	108.57	
	Bawang Putih	2.31	2.10	2.13	2.28	2.29	2.31	2.36	2.41	2.38	2.60		112.38	113.1	104.39	113.54	
	wortel	0.84	0.72	0.75	0.82	0.83	0.84	0.82	0.09	0.86	0.92		113.89	12.0	104.88	110.84	
	Kentang	8.94	8.02	8.05	8.92	8.92	8.94	8.92	8.94	8.95	9.74		111.22	111.1	100.34	109.19	
	Kubis/Kol	1.49	1.33	1.36	1.49	1.49	1.49	1.49	2.02	1.56	1.65		112.03	148.5	104.70	110.74	
	Petsai/Sawi	1.71	1.47	1.50	1.69	1.70	1.71	1.61	1.69	1.70	1.83		109.52	112.7	100.59	107.65	
	Tomat	2.81	2.08	2.11	2.33	2.55	2.81	2.33	2.55	2.37	2.58		112.02	120.9	101.72	101.18	
	Pisang	9.41	7.04	7.07	7.78	8.55	9.41	7.78	8.13	8.13	8.56		110.51	115.0	104.50	100.12	
	Mangga	7.69	5.75	5.78	6.54	6.99	7.69	6.54	6.00	6.62	6.99		113.74	103.8	101.22	100.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pepaya	9.00	8.08	8.11	8.50	8.75	9.00	8.38	8,16	8.21	9.83		103.71	100,6	96.59	112.34	
	Jahe	12.8	12.87	12.90	12.70	12.75	12.8	12,6	12	11.93	13.51		97.90	93,0	93,94	105.96	
	Kunyit	7.75	7.92	7.95	7.65	7.7	7.75	7,6	7,03	7.63	7.70		95.96	88,4	99.74	100.00	
	Kencur	8.2	7,9	8,08	8.10	8.15	8.2	7,7	8,00	7.53	8.15		97.47	99,0	92.96	100.00	
Cakupan Nilai Produksi Tanaman Perkebunan																	
	Kelapa	1.40	1.20	1.50	1.00	1.20	1.40	1,5	1,50	1,00	0,94		125.00	100,00	100.00	78.33	
	Kakao	1.80	1.50	1,60	1.77	1.78	1.80	1,77	0,20	0,05	0,83		118.00	12,50	2.82	46.63	
	Jambu Mete	0.80	2.00	1,00	0.80	0.80	0.80	0,80	-0,65	0,06	0,25		40.00	-65,00	7,50	31.25	
	Kopi	1.00	1.50	1,60	0.80	0.90	1.00	1,29	1,56	0,77	-0,98		86.00	97,50	96.25	108,89	
	Kemiri	1.90	1.30	1,50	1.80	1.85	1.90	1,76	0,19	0,03	0,04		135.38	12,67	1,67	2,16	
	Cengkeh	1.50	4.00	5,00	1.30	1.40	1.50	1,23	4,68	0,67	0,39		30.75	93,60	51.54	27.86	
	Pala	0.65	3.00	4,00	0.55	0.60	0.65	4,88	0,49	1,23	-0,02		162.67	12,25	223.64	-3,33	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cakupan Nilai Produksi Peternakan (Persentase)																	
	Sapi	2.50	1.00	1.00	2.50	2.50	2.50	-3.85	8,29	2,62	2,01		(385.00)	829	104,8	80,4	
	Kerbau	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-5.76	19,13	1,02	1,12		(576.00)	1.913	102.00	112,00	
	Babi	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	46.03	1,69	1,05	2,09		1.534,33	56	52.50	104,50	
	Kambing	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	-1.18	(3.37)	2,08	0,40		(59.00)	(169)	208.00	40,00	
	Ayam	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-0.05	(22,28)	3,61	3,16		(1.67)	(743)	120,33	105,33	
	Telur	2.75	5.00	5.00	2.75	2.75	2.75	1.63	11,70	2,76	2,79		32,60	234	100,36	101,45	

2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan

Pertumbuhan pendapatan tahun 2019 – 2024 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 1.157.632.110 atau 89,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.298.388.000,-. Selama periode tahun 2019–2024 pelaksanaan berbagai program dan kegiatan rutin dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende, mendapat total dukungan Dana dari APBD II Kabupaten Ende Tahun 2019-2023 sebesar Rp. 118.293.021.507,- yang terdiri dari Belanja Operasional berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 75.724.338.954,- Belanja Barang dan jasa Sebesar Rp.29.252.458.770,- Belanja Hibah Rp.8.529.620.919,- Belanja Modal Sebesar Rp. 4.786.602.864,- dengan total realisasi Tahun Anggaran 2019-2023 Sebesar Rp. 113.223.724.233,- atau 95,71%.

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2019 -2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
PENDAPATAN DAERAH	221.388.000	250.000.000	273.000.000	277.000.000	277.000.000	208.840.000	268.437.110	270.472.500	228.002.500	181.880.000	94,33	107,37	99,07	82,31	65,66
Pendapatan Asli Daerah	221.388.000	250.000.000	273.000.000	277.000.000	277.000.000	208.840.000	268.437.110	270.472.500	228.002.500	181.880.000	94,33	107,37	99,07	82,31	65,66
BELANJA OPERASIONAL	21.786.499.754	21.108.314.030	23.413.678.626	25.451.306.052	21.746.620.181	20.695.932.369	19.643.733.503	21.769.097.096	24.878.255.396	21.599.063.314	94,99	93,06	92,98	97,75	99,32
Belanja Pegawai	15.042.957.234	12.900.472.030	16.648.213.936	15.956.182.263	15.176.513.491	14.051.204.260	12.668.810.571	15.396.430.101	15.554.958.712	15.092.929.162	93,41	98,20	92,48	97,49	99,45
Belanja Barang dan Jasa	6.743.542.520	8.207.842.000	5.619.450.390	2.111.517.170	6.570.106.690	6.644.728.109	6.974.922.932	5.226.652.695	2.086.964.504	6.506.134.152	98,53	84,98	93,01	98,84	99,03
Belanja Hibah	0	0	1.146.014.300	7.383.606.619	0	0	0	1.146.014.300	7.236.332.180	0	-	-	100	98,01	-
BELANJA MODAL	1.736.682.750	137.234.000	2.804.276.874	47.443.430	60.965.810	1.610.863.800	133.409.900	2.784.961.615	47.441.430	60.965.810	92,76	97,21	99,31	100	100
JUMLAH	23.523.182.504	21.245.548.030	26.217.955.500	25.498.749.482	21.807.585.991	22.306.796.169	19.777.143.403	24.554.058.711	24.925.696.826	21.660.029.124	94,83	93,09	93,65	97,75	99,32

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) maka, dapat dirumuskan berbagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan PD

Upaya pengembangan pelayanan PD berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan pertanian bukan merupakan hal yang mudah karena dihadapkan tantangan yang tidak mudah, antara lain:

1. Bagaimana menyediakan sumber daya serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai baik kuantitas dan kualitas untuk mendukung peningkatan kebutuhan akan pelayanan PD;
2. Bagaimana meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian melalui sistem pertanian yang ramah lingkungan;
3. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian;
4. Membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah;
5. Mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman (OPT), Penyakit Hewan Menular dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
6. Memperbaiki citra petani dan pertanian agar tidak dipandang sebelah mata/ ditinggalkan sehingga dapat kembali diminati oleh pekerja produktif/generasi muda;
7. Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian di pedesaan;
8. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, serta
9. Mengembangkan komoditas unggulan daerah dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
10. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian secara terpadu dan sinergis berbasis kawasan, berdasarkan kondisi agro ekosistem dan potensi pengembangan serta kondisi sosial ekonomis kawasan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan PD

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melaksanakan pembangunan berbasis desa/Kelurahan di mana sebagian besar penduduknya hidup dari mata pencaharian sebagai petani;
2. Potensi sumber daya alam berupa ketersediaan lahan dan air yang belum dimanfaatkan secara optimal;

3. Meningkatnya kebutuhan akan produk pertanian akibat peningkatan konsumsi per kapita, peningkatan pendapatan serta perubahan preferensi konsumen yang memberikan peluang bagi pertumbuhan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
4. Ketersediaan benih/bibit berkualitas dan teknologi budidaya yang semakin berkembang namun belum dimanfaatkan secara baik;
5. Semakin banyaknya lembaga pendidikan yang menyediakan tenaga terdidik terampil yang dapat menjadi pendukung ketersediaan SDM Pertanian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Ende periode 2025-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2024. Namun demikian, guna penyusunan perencanaan pembangunan Pertanian yang berkelanjutan kedepannya maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja.

Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian dimasa yang akan datang khususnya tahun 2025-2026, mencakup aspek: produksi, kesejahteraan petani, dan kelestarian sektor Pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Ende sangat dipengaruhi oleh kondisi factor internal dan factor eksternal. Kondisi dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Ende. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah: 1). Masih terbatasnya jumlah ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; 2). Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; dan 3). optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura, Peternakan dan perkebunan; Disamping factor internal iatas, beberapa factor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ende, diantaranya adalah : 1). Kurangnya kesejahteraan petani ; 2). Lahan pertanian yang semakin berkurang.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan Pertanian selama periode 2 (dua) tahun dari tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura, Peternakan dan perkebunan sebagai wujud kontribusi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Ende
2. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.

Tabel.3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya Ketersediaan Pangan / pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan ➤ Rendahnya tingkat kesejahteraan petani 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi yang dimiliki oleh petani - Masih tingginya kehilangan hasil - Luas kepemilikan lahan sempit dan tersebar - Dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tumbuhan - Belum optimalnya penggunaan benih berserifikat. - Kurangnya nilai tambah bagi petani. - Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
 Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Tabel.3.2 Matrik SWOT

Matrik SWOT	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Potensi lahan dan iklim yang mendukung untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Sempitnya luas kepemilikan lahan pertanian 2. Rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur) sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi 3. Penguasaan Teknologi pertanian yang masih terbatas, sehingga Produktivitasnya menjadi rendah 5. Ketersediaan benih sumber untuk sertifikasi masih terbatas 6. Tingkat kehilangan dan kerusakan hasil produksi masih tinggi 7. Penerapan Teknologi pasca Panen, pengolahan hasil dan pemasaran belum optimal 8. Pertumbuhan produksi masih fluktuatif 9. Pemilikan modal petani masih relative kecil 10. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras.

PELUANG	ANCAMAN
1. Letak geografis yang strategis dengan pasar domestic Kabupaten lainnya	1. Masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian
2. Meningkatnya kebutuhan pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk	2. Berkurangnya minat tenaga kerjadi sector pertanian
3. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu	3. Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim terhadap pertanaman
4. Komitmen pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan	4. Kemandirian petani yang masih rendah
5. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitiandan Pengembangan usaha	5. Berfluktuasi harga produk pertanian dan tingginya suku bunga usahatan
	6. Meningkatnya produk pangan impor dipasar domestik

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi dari kementerian Pertanian yakni:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai 3 Misi yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Untuk mencapai Visi - Misi tersebut Kementerian Pertanian memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanian Provinsi NTT

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke

bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim;

1. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Eksternal Berupa Tantangan

Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan : kondisi produktivitas pertanian primer di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkan aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.

- 1) Meingkatkan permintaan akan produk pertanian berkualitas secara kontinyu.
- 2) Pengelolaan lahan tidur potensial yang belum dilaksanakan dengan baik.
- 3) Perbaiki teknik budidaya untuk menjamin peningkatan produksi, kualitas produksi dan keberlanjutan usaha pertanian.

- 4) Mekanisme peredaran pupuk bersubsidi yang panjang mengakibatkan adanya kelangkaan pupuk, pupuk tidak tepat jumlah dan lokasi.
- 5) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan : Saat ini kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian belum optimal. Infrastruktur lainnya yaitu benih juga masih kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu, balai benih, kebun benih maupun kebun induk belum tersebar merata di semua kabupaten.
- 6) Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah : Usaha pertanian rakyat masih berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pedesaan.
- 7) Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan: kelembagaan usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata.
- 8) Sistem penyuluhan pertanian yang efektif : Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan
- 9) selain itu luas wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal.

b. Lingkungan Strategis Internal Berupa Kelemahan

- 1) Tingkat kedisiplinan dan kualitas SDM (pegawai) yang relatif rendah.
- 2) Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan.
- 3) Belum terbangunnya secara optimal sistem koordinasi yang terpadu baik antar lembaga maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah mulai dari aspek perencanaan sampai dengan aspek monitoring dan evaluasi.

3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut “Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja untuk Penyusunan Rencana Strategis.

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam kerangka pembangunan Peternakan, misi yang diemban sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur telaahan strategis Misi Satu, yakni mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil adalah menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah, dengan sasaran utama adalah meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang dilakukan adalah peningkatan produksi bibit dan benih ternak, percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi daerah menuju industrialisasi 4,0 serta mengintegrasikan pembangunan sektor peternakan dengan pembangunan pertanian berupa penumbuhan dan pengembangan pusat pembibitan ternak (breeding farm), melakukan revitalisasi pola dan teknik peternakan yang lebih produktif bernilai tambah dan berdaya saing diantaranya dengan mendorong pengembangan peternakan intensif yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana untuk menghasilkan bibit bermutu dan pakan berkualitas secara kontinyu dengan penerapan teknik inseminasi buatan, pembibitan ternak dan kebun pakan ternak, introduksi bibit unggul dan variant baru maupun industri pakan ternak berbahan baku lokal.

Program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang menjadi tugas PD Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup satu program, yakni Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang menginduk pada program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan, yakni :

1. Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak.
2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

3. Pengembangan Agribisnis Peternakan
4. Peningkatan Inovasi Penerapan Teknologi Pertanian.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi landasan bagi pembangunan pertanian dalam menentukan target fokus dan lokasi kegiatan pertanian serta menjadi landasan arah pembanguan pertanian di daerah khususnya dalam pengembangan komoditi berbasis kawasan. Namun dukungan sarana, prasarana belum memadai dalam menciptakan sistim konektifitas untuk pengembangan pertanian yang berbasis pada kawasan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan pada berbagai permasalahan dan perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah serta untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT dan Bupati Kabupaten Ende, maka isu-isu strategis pembangunan Pertanian di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Kekuatan
 - a. Kelembagaan kelompok tani sudah terbentuk sampai tingkat desa;
 - b. Produksi komoditas tanaman pangan (padi) sudah dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan (beras) masyarakat Kabupaten Ende;
 - c. Ketersediaan Alsintan yang dimiliki oleh kelompok tani di Kab/Kota;
 - d. Luas panen komoditas tanaman pangan (padi) optimal;
 - e. Populasi ternak yang tinggi (ekor).
2. Peluang
 - a. Kebijakan revitalisasi penyuluhan pertanian;
 - b. Kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;
 - c. Kebijakan peningkatan produksi hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasokan dan stabilitas harga;
 - d. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) melalui mekanisasi pertanian;
 - e. Peningkatan jumlah pelaku usaha produk Pertanian dan produk olahan asal
 - f. Kebijakan peningkatan produksi hasil Pertanian untuk memenuhi kebutuhan protein

3. Kelemahan

- a. Tingkat kemandirian kelompok masih rendah;
- b. Produksi belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat ;
- c. Manajemen Pengelolaan Alsintan belum dilaksanakan dengan system UPJA;
- d. Produktivitas belum sesuai dengan potensinya;
- e. Prasarana sarana Pertanian;
- f. Tenaga teknis Pertanian terbatas.

4. Ancaman

- a. Dampak Pengaruh Iklim (DPI);
- b. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Ha/Rph/Phn);
- c. Persaingan usaha penggunaan jasa Alsintan;
- d. Serangan penyakit dan munculnya wabah penyakit menular (ekor).
- e. Adanya ancaman bencana banjir dan kekeringan yang menyebabkan puso dan wabah penyakit tanaman pertanian
- f. Adanya hambatan dalam penyediaan sarana produksi;
- g. Belum terciptanya rasio yang ideal antara jumlah petugas dibanding petani Pertanian;
- h. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan;

BABIV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2025-2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

a. Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian selama periode tahun 2025-2026 adalah:

1. Memantapkan produksi komoditas pertanian sebagai wujud kontribusi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Ende.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan pertanian yang akan dicapai selama periode tahun 2025-2026 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produktivitas Produksi Tanaman Pangan.
2. Terwujudnya peningkatan produktivitas Produksi Tanaman Hortikultura.
3. Terwujudnya peningkatan produksi Produksi Tanaman Perkebunan.
4. Terwujudnya peningkatan produksi Peternakan.
5. Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP) Dinas Pertanian.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran pada Tahun Ke-n		
					1	2	3
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Sub Sektor Tanaman Pangan.	Cakupan Nilai Produksi Tanaman Pangan (Ton/ Ha)	9,52	9,54	9,56
				a. Padi sawah	5,02	5,03	5,04
				b. Padi Ladang	3,02	3,03	3,04
				c. Jagung	4,02	4,04	4,06
				d. Ubi Kayu	26,00	26,05	26,08
			Meningkatnya Produktivitas Sub Sektor Hortikultura.	Cakupan Nilai Produksi Tanaman Hortikultura (ton/ha)	5,52	5,61	5,68
				a. Cabe Rawit	1,39	1,43	1,50
				b. Cabe Besar	1,60	1,65	1,66
				c. Bawang Merah	2,46	2,50	2,53
				d. Bawang Putih	2,31	2,38	2,39
				e. Pisang	8,41	8,50	8,53
				f. Mangga	6,69	6,70	6,75
				g. Advokat	5,10	5,12	5,14
				h. Jahe	12,00	12,50	12,85
				i. Kunyit	7,68	7,70	7,75
				j. Kencur	7,56	7,60	7,70
			Meningkatnya Produktivitas Sub Sektor Perkebunan	Cakupan Nilai Produksi Tanaman Perkebunan (Persentase)	0,40	1,81	1,97
				a. Kelapa	0,15	0,16	0,17

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran pada Tahun Ke- n		
					1	2	3
				b. kopi	0,16	0,17	0,18
				c. kakao	0,17	0,18	0,19
				d. Jambu Mete	0,50	0,06	0,17
				e. Pala	1,00	1,24	1,26
			Meningkatnya Produktivitas Sub Sektor Peternakan	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (Persentase)	1,13	1,16	1,20
				a. Sapi	1,50	1,60	1,70
				c. Babi	1,00	1,02	1,04
				d. Kambing	1,00	1,01	1,02
				e. Ayam	1,00	1,01	1,02
			Meningkatnya kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP) Dinas Pertanian	BNilai AKIP	B Nilai AKIP	BNilai AKIP

BAB.V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Ende.

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan - permasalahan sektor pertanian adalah:

1. Pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas strategis secara terpadu dan terintegrasi;
2. Pengembangan Sistem penyediaan benih/bibit daerah;
3. Fasilitasi peningkatan produksi, produktifitas dan mutu serta daya saing produk pertanian ;
4. Fasilitasi peningkatan produksi, produktifitas dan mutu serta daya saing produk pertanian;
5. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan lahan;
6. Pengendalian laju alih fungsi lahan;
7. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan air ;
8. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan lahan;
9. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani;
10. Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur;
11. Penguasaan informasi dan teknologi khususnya pasar dan permodalan;

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Pertanian Kabupaten Ende tahun 2025 –2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	1. Pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas strategis secara terpadu dan terintegrasi	Pembentukan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan sesuai kondisi agro ekosistem dan sosial ekonomis, di lakukan secara terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir serta lintas sektor/ stakeholder.
			2. Pengembangan Sistem penyediaan benih/bibit daerah	a. Pembentukan dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang UPTD Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan, Horikultura, Perkebunan dan Peternakan b. Fasilitasi penangkaran benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di tingkat petani/ kelompok tani
			3. Fasilitasi peningkatan produksi, produktifitas dan mutu serta daya saing produk pertanian	a. Peningkatan pembinaan bagi penerapan panca usaha tani/ ternak
			4. Fasilitasi peningkatan produksi, produktifitas dan mutu serta daya saing produk pertanian	b. Penyediaan sarana berupa benih, bibit unggul, pupuk, pestisida dan obat-obatan pertanian dan peternakan yang memadai
				c. Pembinaan dan pengembangan produksi pupuk di tingkat petani melalui penyediaan APPO/UPPO

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>d. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</p> <p>e. Penyediaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan</p> <p>f. Pembinaan kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk peningkatan produktivitas ternak serta penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)</p> <p>g. Fasilitasi pengembangan produk pertanian organik (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)</p>
			<p>5. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan lahan</p>	<p>a. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan lahan seperti pembukaan Jalan Usaha, Jalan Produksi Tani pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, optimalisasi pengelolaan lahan serta konservasi dan rehabilitasi lahan</p> <p>b. Penyediaan peralatan dan mesin pertanian pra panen</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Pengendalian laju alih fungsi lahan	a. Pembukaan lahan usaha tani baru pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan b. Inisiasi penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan
			7. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan air	Penyediaan dan perbaikan prasarana pengelolaan air seperti saluran irigasi, jaringan irigasi Air Permukaan, Irigasi Air Tanah, Embung, Long Storage serta penyediaan pompa air
			8. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan lahan	a. Penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan lahan seperti pembukaan Jalan Usaha, Jalan Produksi Tani pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, optimalisasi pengelolaan lahan serta konservasi dan rehabilitasi lahan b. Penyediaan peralatan dan mesin pertanian pra panen.
			9. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani	Pendampingan petani dan kelompoknya tentang manajemen kelompok tani dan usaha tani.
			10. Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur	Pelatihan dan Pendidikan aparatur baik diklat jabatan maupun diklat teknis.
			11. Penguasaan informasi dan teknologi khususnya pasar dan permodalan	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan petani.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Kabupaten Ende.

Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada satu urusan pilihan (pertanian).

2.2 Rencana Program / Kegiatan / sub Kegiatan

Dalam perkembangan periode tahun 2025-2026, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor pertanian dan meningkatkan keajahteraan petani di Kabupaten Ende, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, program dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian ;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah:

Tabel 6.1 .Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian														
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)														
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
				Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Ayam	3,61%	1,00%	27.000.000,00	1,01%	75.000.000,00	1,02%	79.500.000,00	1,02%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Babi	2,07%	1,00%	27.000.000,00	1,02%	75.000.000,00	1,04%	79.500.000,00	1,04%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Kambing	1,05%	1,00%	27.000.000,00	1,01%	75.000.000,00	1,02%	79.500.000,00	1,02%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Sapi	2,61%	1,50%	27.000.000,00	1,60%	75.000.000,00	1,70%	79.500.000,00	1,70%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Jambu Mente	0,04%	0,05%	20.000.000,00	0,06%	50.000.000,00	0,17%	53.000.000,00	0,17%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Kakao	0,06%	0,17%	40.000.000,00	0,18%	100.000.000,00	0,19%	106.000.000,00	0,19%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Kelapa	0,04%	0,15%	20.000.000,00	0,16%	50.000.000,00	0,17%	53.000.000,00	0,17%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Kopi	0,05%	0,16%	40.000.000,00	0,17%	100.000.000,00	0,18%	106.000.000,00	0,18%	Dinas Pertanian	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Pala	1%	1,22%	20.000.000,00	1,24%	50.000.000,00	1,26%	53.000.000,00	1,26%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) bawang merah	2,48 ton/ha	2,46 ton/ha	40.000.000,00	2,5 ton/ha	100.000.000,00	2,53 ton/ha	106.000.000,00	2,53 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) cabe besar	1,64 ton/ha	1,6 ton/ha	40.000.000,00	1,65 ton/ha	100.000.000,00	1,66 ton/ha	106.000.000,00	1,66 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) caberawit	1,42 ton/ha	1,39 ton/ha	40.000.000,00	1,43 ton/ha	100.000.000,00	1,5 ton/ha	106.000.000,00	1,5 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) Mangga	6,62 ton/ha	6,69 ton/ha	40.000.000,00	6,7 ton/ha	100.000.000,00	6,75 ton/ha	106.000.000,00	6,75 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) Alpukat	5,03 ton/ha	5,1 ton/ha	30.000.000,00	5,12 ton/ha	75.000.000,00	5,14 ton/ha	79.500.000,00	5,14 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) bawang putih	2,37 ton/ha	2,31 ton/ha	40.000.000,00	2,38 ton/ha	100.000.000,00	2,39 ton/ha	106.000.000,00	2,39 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) Jahe	11,93 ton/ha	12 ton/ha	30.000.000,00	12,5 ton/ha	75.000.000,00	12,85 ton/ha	79.500.000,00	12,85 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) Kencur	7,53 ton/ha	7,56 ton/ha	40.000.000,00	7,6 ton/ha	100.000.000,00	7,7 ton/ha	106.000.000,00	7,70 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai	7,62 ton/ha	7,68	20.000.000,00	7,7	50.000.000,00	7,75	53.000.000,00	7,75 ton/ha	Dinas	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) kunyit		ton/ha		ton/ha		ton/ha		Pertanian	Ende	
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) Pisang	8,13 ton/ha	8,41 ton/ha	40.000.000,00	8,5 ton/ha	100.000.000,00	8,53 ton/ha	106.000.000,00	8,53 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha) jagung	4,01 ton/ha	4,02 ton/ha	50.000.000,00	4,04 ton/ha	150.000.000,00	4,06 ton/ha	156.000.000,00	4,06 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha) padi ladang	3,00 ton/ha	3,02 ton/ha	50.000.000,00	3,03 ton/ha	150.000.000,00	3,04 ton/ha	156.000.000,00	3,04 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha) Padi Sawah	7,01 ton/ha	5,02 ton/ha	80.000.000,00	5,03 ton/ha	180.000.000,00	5,04 ton/ha	186.000.000,00	5,04 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
				Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/ha) Ubi Kayu	25,04 ton/ha	26 ton/ha	50.000.000,00	26,05 ton/ha	150.000.000,00	26,08 ton/ha	156.000.000,00	26,08 ton/ha	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											
				Tersedianya sarana produksi komoditi pertanian dan alat/mesin pertanian	4 Paket	4 Paket	548.000.000,00	8 Paket	1.350.000.000,00	8 Paket	1.371.000.000,00	8 Paket	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											
				Tersedianya benih/bibit unggul Pertanian dan Peternakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	210.000.000,00	4 Paket	Dinas Pertanian	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain											
			Tersedianyabibit dan pakan ternak	4 Paket	2Paket	270.000.000,00	4Paket	630.000.000,00	4 Paket	720.000.000,00	4 Paket	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
			Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan PrasaranaPertanian	17 Unit	28 Unit	670.000.000,00	30 Unit	1.595.000.000,00	32 Unit	1.688.000.000,00	32 Unit	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian											
			Terlaksananya Pengembangan PrasaranaPertanian	2 Dokumen	2Dokumen	110.000.000,00	2Dokumen	170.000.000,00	2Dokumen	238.000.000,00	2 Dokumen	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											
			Terbangunnya prasarana pertanian yang memadai	23 paket	25 paket	620.000.000,00	30 paket	1.395.000.000,00	32 paket	1.438.000.000,00	32 paket	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											
			Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	180.000.000,00	100%	330.000.000,00	100%	348.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota											
			Terlaksananya vaksinasi penyakit zoonosis	37500 Dosis/pelayanan	52500 Dosis/pelayanan	50.000.000,00	52500 Dosis/pelayanan	120.000.000,00	52500 Dosis/pelayanan	125.000.000,00	52500 Dosis/pelayanan	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota											
			JumlahPelayanandi	16000 Samp	17000 S	80.000.000,00	17000 S	120.000.000,00	17000 S	130.000.000,00	17000 Sampel/P	Dinas	Kab.	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				laboratorium dan pelayanan kesehatan hewan	el/Pelayanan	ampel/Pelayanan		ampel/Pelayanan		ampel/Pelayanan		elayanan	Pertanian	Ende
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner											
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	4320 sampel	1456 sampel	50.000.000,00	1456 sampel	90.000.000,00	1456 sampel	93.000.000,00	4368 sampel	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
				Terkendalinya Bencana Pertanian	100%	100%	710.000.000,00	100%	1.530.000.000,00	100%	1.623.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota											
				terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penyakit hewan	2 paket	2 paket	710.000.000,00	2 paket	1.530.000.000,00	2 paket	1.623.000.000,00	2 paket	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
				Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkatkan Statusnya	157 Kelompok	20 Kelompok	838.000.000,00	30 Kelompok	1.815.000.000,00	40 Kelompok	1.926.000.000,00	40 Kelompok	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											
				Cakupan bina kelompok tani yang meningkatkan statusnya	100%	100%	838.000.000,00	100%	1.815.000.000,00	100%	1.926.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Penyelenggaraan Administrasi	100%	100%	16.701.769.963,00	100%	17.907.565.595,00	100%	18.005.069.968,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
						0		0		0				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun										
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	150.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
			Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	15.001.769.963,00	100%	16.007.565.595,00	100%	16.005.069.968,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
						0		0		0				
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
			Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	350.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	500.000.000,00	100%	600.000.000,00	100%	600.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	Dinas Pertanian	Kab. Ende

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang pertanian untuk menunjang pencapaian target yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja perangkat daerah yang serta target yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD selama 2 tahun tersaji dala tabel 7.1

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Ende Tahun 2025 – 2026

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (Tahun 2022)		TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN			KONDISI KIENRJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Satuan	nilai	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1. Cakupan Nilai Produksi Tanaman Pangan (ton/ha)	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan (Ton)}}{\text{Luas Areal Panen Tanaman Pangan (Ha)}}$	Ton/ha	9,77	9,52	9,54	9,56	9,56
2. Cakupan Nilai Produksi Hortikultura (ton/ha)	$\frac{\text{Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)}}{\text{Luas Areal Panen Hortikultura (Ha)}}$	Ton/ha	5,48	5,52	5,61	5,68	5,68
3. Cakupan Nilai Produksi Tanaman Perkebunan (%)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (ton) pada tahun n - Produksi pada tahun n-1}}{\text{Jumla Produksi Tanaman Perekbunan pada tahun n-1}} \times 100$	%	0,28	0,40	1,81	1,97	1,97
4. Cakupan Nilai Produksi Peternakan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Peternakan tahun n - jumlah produksi Peternakan tahun n-1}}{\text{Junlah produksi ternak tahun n-1}} \times 100$	%	2,34	1,13	1,16	1,20	1,20

Tabel 7.2. Disajikan pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian kabupaten Ende

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penaanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Ayam	3,61%	1,00%	27.000.000,00	1,01%	75.000.000,00	1,02%	79.500.000,00	1,02 %	Dinas Pertanian
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Babi	2,07%	1,00%	27.000.000,00	1,02%	75.000.000,00	1,04%	79.500.000,00	1,04 %	Dinas Pertanian
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Kambing	1,05 %	1,00 %	27.000.000,00	1,01 %	75000.000,00	1,02%	79.500.000,00	1,02%	Dinas Pertanian
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) Sapi	2,61%	1,50%	27.000.000,00	1,60%	75.000.000,00	1,70%	79.500.000,00	1,70 %	Dinas Pertanian
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Jambu Ment	0,04%	0,05%	20.000.000,00	0,06%	50.000.000,00	0,17%	53.000.000,00	0,17%	Dinas Pertanian
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Kakao	0,06%	0,17%	40.000.000,00	0,18%	100.000.000,00	0,19%	106.000.000,00	0,19%	Dinas Pertanian
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) Kelapa	0,04 %	0,15%	20.000.000,00	0,16%	50.000.000,00	0,17%	53.000.000,00	0,17%	Dinas Pertanian
3	2	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan(%) Kopi	0,05%	0,16%	40.000.000,00	0,17%	100.000.000,00	0,18%	106.000.000,00	0,18 %	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan(%) Pala	1 %	1,22 %	20.000.000,00	1,24 %	50.000.000,00	1,26 %	53.000.000,00	1,26 %	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultura (Ton/ha) Keneur	7,53 ton/ha	7,56 ton/ha	40.000.000,00	7,60 ton/ha	100.000.000,00	7,70 ton/ha	106.000.000,00	7,70 ton/ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultura (Ton/ha) kunyit	7,62 ton/ha	7,68 ton/ha	20.000.000,00	7,70 ton/ha	50.000.000,00	7,75 ton/ha	53.000.000,00	7,75 ton/ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton / ha) Alpukat	5,03 Ton/Ha	5,1 Ton/Ha	30.000.000,00	5,12 Ton/Ha	75.000.000,00	5,14 Ton/Ha	79.500.000,00	5,14 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton / ha) Bawang Merah	2,48 Ton/Ha	2,46 Ton/Ha	40.000.000,00	2,5 Ton/Ha	100.000.000,00	2,53 Ton/Ha	106.000.000,00	2,53 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton / ha) Cabe Besar	1,64 Ton/Ha	1,60 Ton/Ha	40.000.000,00	1,65 Ton/Ha	100.000.000,00	1,66 Ton/Ha	106.000.000,00	1,66 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton/ha) Cabe Rawit	1,42 Ton/Ha	1,39 Ton/Ha	40.000.000,00	1,43 Ton/Ha	100.000.000,00	1,5 Ton/Ha	106.000.000,00	1,5 Ton/Ha	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton / ha) Jahe	11,93 Ton/Ha	12,00 Ton/Ha	30.000.000,00	12,50 Ton/Ha	75.000.000,00	12,85 Ton/Ha	79.500.000,00	12,85 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton / ha) Mangga	6,62 Ton/Ha	6,69 Ton/Ha	40.000.000,00	6,70 Ton/Ha	100.000.000,00	6,75 Ton/Ha	106.000.000,00	6,75 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton/ ha) Pisang	8,13 Ton/Ha	8,41 Ton/Ha	40.000.000,00	8,5 Ton/Ha	100.000.000,00	8,53 Ton/Ha	106.000.000,00	8,53 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton/ ha) Bawang Putih	2,37 Ton/Ha	2,31 Ton/Ha	40.000.000,00	2,38 Ton/Ha	100.000.000,00	2,39 Ton/Ha	106.000.000,00	2,39 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/ ha) Jagung	4,01 Ton/Ha	4,02 Ton/Ha	50.000.000,00	4,04 Ton/Ha	150.000.000,00	4,06 Ton/Ha	156.000.000,00	4,06 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha) Padi Ladang	3,00 Ton/Ha	3,02 Ton/Ha	50.000.000,00	3,03 Ton/Ha	150.000.000,00	3,04 Ton/Ha	156.000.000,00	3,04 Ton/Ha	Dinas Pertanian
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha) Padi sawah	7,01 Ton/Ha	5,02 Ton/Ha	80.000.000,00	5,03 Ton/Ha	180.000.000,00	5,04 Ton/Ha	186.000.000,00	5,04 Ton/Ha	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	
3	2 7	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/ ha) Ubi Kayu	25,04 Ton/Ha Ton/Ha	26 Ton/Ha 50.000.000,00 Ton/Ha	26,05 Ton/Ha Ton/Ha	150.000.000,00	26,08 Ton/Ha Ton/Ha	156.000.001.00	26,08 0 Ton/Ha Ton/Ha	Dinas Pertanian	
3	2 7	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17 Unit	28 Unit	670.000.000,0 0	30 Unit	1.595.000.000, 00	33 Unit	1.688.000.000, 00	33 Unit	Dinas Pertanian
3	2 7	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terlaksannya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	180.000.000,0 0	100%	330.000.000,00	100 %	348.000.000,00	100 %	Dinas Pertanian
3	2 7	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya Bencana Pertanian	100%	100%	710.000.000,0 0	100%	1.530.000.000, 00	100 %	1.623.000.000, 00	100 %	Dinas Pertanian
3	2 7	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkatkan Statusnya	157 Kelompok	20 Kelo mpok	838.000.000,0 0	30 Kelo mpok	1.815.000.000, 00	40 Kelo mpok	1.926.000.000, 00	40 Kelompok	Dinas Pertanian

BAB. VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPD 2025 – 2026, merupakan panduan bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Ende sertadapat menjadi acuan dari parapemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pertanian jangka menengah di Kabupaten Ende untuk periode tahun 2025-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Perangkat Daerah hingga 2 (dua) tahun mendatang dan menjadi bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ende ini sangat bergantung pada kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah. Selain itu juga dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, lembaga/organisasi mitra dan pihak terkait lainnya. Dengan banyaknya *stakeholders* yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Strategis ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor/instansi merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pencapaian berbagai target pembangunan pertanian di Kabupaten Ende.

Dokumen Rencana Strategis ini bukan merupakan sesuatu yang sempurna, oleh karena itu saran dan masukan yang baik merupakan hal yang sangat diperlukan terutama dalam aspek pelaksanaan dan evaluasi berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat, sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur PD Dinas Pertanian Kabupaten Ende dan semoga dapat menjadi acuan yang baik pula bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang turut berkontribusi bagi keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Ende. Atas partisipasi dan dukungan semua pihak bagi penyusunan Rencana Strategis ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Ende, 2024

BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU